BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan kesempatan membentuk partai politik sebagai badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak mengakomodir lagi keberadaan partai lokal. Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2011 menyatakan: "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional*". Selain itu dengan adanya Syarat keterwakilan pendiri dan syarat kepengurusan di seluruh provinsi membuat partai lokal tidak dapat dibentuk kembali. Sejalan dengan hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Rifqinizamy Karsayuda berpendapat bahwa UU No.2 Tahun 2011 telah mengamputasi hak dan keinginan partai politik lokal di tingkat daerah yang merupakan aspirasi masyarakat daerah. Menurut Beliau, UU No.2 Tahun 2011 pun telah

bertentangan dengan konstitusi yaitu mengenai Prinsip negara kesatuan yang majemuk, di mana ada otonomi daerah di dalam dan otonomi politik yang mesti diwujudkan sebagaimana amanat konstitusi.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memicu adanya pemborosan keuangan. Syarat pendirian, syarat kepengurusan dan syarat adanya kantor tetap dalam UU No.2 Tahun 2011 telah memicu adanya pemborosan keuangan. Sebagaimana yang telah diakui oleh 18 parpol dalam uji materil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pemohon mengungkapkan bahwa persyaratan tersebut terlalu berat dan akan menghabiskan biaya puluhan miliar untuk menyanggupi persyaratan tersebut. Kalangan aktifis pun beranggapan kehadiran unsur bisnis/pengusaha dalam partai politik akan menghambat kinerja Partai dan membuat konflik kepentingan. Sejalan dengan Hal tersebut, Menurut Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mahardika berpendapat bahwa mahalnnya ongkos politik yang mahal disebabkan juga karena mahalnnya biaya untuk mendirikan partai politik. Selain itu Perludem mengungkapkan riset mengenai mahalnnya biaya politik, seperti biaya Rp.20-30 Miliar untuk menjadi Bupati/Wali Kota dan Rp.30-100 Miliar Untuk menjadi

Gubernur. Maka Kehadiran Partai Hijau dan Partai Buruh akan memberi pilihan lebih kepada Masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyulitkan berdirinya partai-partai yang muncul dari *grass root* (*gerakan akar rumput*). *Grass root* atau kalangan akar rumput merupakan gerakan yang berasal dari kalangan menengah kebawah dan merupakan antitesis dari elit-elit Negara. Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 dianggap sebagai gerakan akar rumput. Partai Buruh dan Partai Hijau merupakan wujud dari keinginan *grass root* (*gerakan akar rumput*) untuk terlibat dalam politik dan memperjuangkan hak masyarakat yang tidak bisa dipenuhi partai konvensional. Walaupun urgensi dari kehadiran *grass root* ini sangat penting adanya, Partai Buruh dan Partai Hijau ini ternyata sulit dibentuk di Indonesia. Seperti yang telah diungkapkan oleh para pendirinya, Alasan utamanya yaitu tidak lain adalah Mahalnya ongkos politik, salah satunya adalah terkait persyaratan pembentukan partai politik. Kalangan *grass root* tersebut juga berpendapat bahwa Partai Konvensional saat ini tidak dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini ada di Masyarakat. Masalah lingkungan dan Masalah Hak Pekerja

akan kontradiktif dengan Kepentingan Pengusaha dalam Partai Politik.

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 lebih membatasi Jumlah Partai Politik. Sistem multi partai seperti yang ada di Indonesia biasa digunakan pada negara dengan pluralitas budaya, ideologi dan latar belakang yang bermacam-macam seperti di Indonesia. Namun lebih tepatnya Indonesia mempunyai sistem multi partai yang sederhana. Sistem tersebut digunakan dalam rangka penyederhanaan jumlah partai politik yang ada di Indonesia. UU No.2 Tahun 2011 sebagai wujud penyederhanaan jumlah partai benar-benar membuat sedikit sekali partai politik terbentuk. Sepanjang UU tersebut berlaku (2011- 2020) hanya ada 2 partai yang berhasil dibentuk dan lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu yaitu Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo. Selain daripada itu merupakan partai politik yang terbentuk dari hasil fusi partai politik lama. Persyaratan yang berat tersebut diakui sendiri oleh pembentuk undang—undang dalam Uji Materil Perkara Nomor 15/PUU-IX/2011. Sejalan dengan hal tersebut, Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, UU No.2 Tahun 2011 merupakan model yang ditempuh oleh Pemerintah dan DPR untuk membubarkan partai-partai politik melalui

undang-undang secara halus. Dengan dasar pemikiran bahwa Pemerintah tidak diberikan kewenangan untuk membubarkan partai politik seenaknya, karena partai yang berkuasa akan cenderung mengeliminir lawan-lawan politiknya.

Dengan alasan-alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesempatan membentuk partai politik dalam UU No.2 Tahun 2011 lebih dibatasi dibandingkan dengan UU No.2 Tahun 2008. UU Nomor 2 Tahun 2011 tersebut sengaja dibuat berat bagi partai politik yang baru dibentuk dengan dalih untuk menyederhanakan jumlah partai politik.

2. Hak berserikat dari setiap warga negara dalam membentuk partai politik dilindungi dan dijamin oleh pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Dalam pelaksanaannya terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan dan kebebasan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Selain itu, kebebasan berserikat pun terkait erat dan merupakan wujud dari hak atas kemerdekaan pikiran hati nurani, sebagaimana telah diatur dalam pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.*”. Ketentuan tersebut digolongkan dalam kelompok hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 28I ayat (1).

Dengan demikian, berdasarkan UUD 1945 maka pengaturan dan pembatasan terhadap kebebasan berserikat harus didasarkan atas suatu alasan rasional yang masuk akal dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar persyaratan pembentukan partai politik berikutnya tidak hanya berupa syarat administratif saja. Alasan umum untuk meningkatkan kualitas dalam penambahan syarat administratif tidak bisa dibenarkan secara sepenuhnya. Maka daripada itu, peningkatan kualitas partai politik bisa dilakukan

dengan cara lain seperti memperhatikan peran partai politik dalam membantu tugas-tugas kemanusiaan, perekrutan kader partai yang berkualitas, ikut membantu konflik agrarian yang sering terjadi di daerah-daerah, melakukan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan terutama pendidikan anti korupsi bagi kader partai.

2. Pembatasan terhadap kebebasan berserikat yang dilakukan Negara terhadap warganya tidak boleh bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan ada di tangan Rakyat. Maka oleh karena itu niat dan usaha serta rekayasa terselubung *elite-elite* politik yang berkedok atas nama rakyat, dan dengan pola menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Selain itu gagasan tentang perlunya upaya untuk melaksanakan penyederhanaan jumlah partai politik pun perlu dikaji lebih dalam kembali oleh pembentuk undang-undang dan disesuaikan dengan kondisi serta keinginan masyarakat Indonesia. Negara multi etnis seperti Indonesia tentunya akan melahirkan partai-partai politik dengan beragam ideologi dan latar belakang. Dengan hadirnya Partai berbasis lingkungan, Partai berbasis buruh, dan Partai berbasis *grass root* lainnya tentu akan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat.